

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Munculnya istilah oligarki sebagai bagian perpolitikan Indonesia bermula dari adanya pemerintahan yang otoriter pada masa orde baru. Kondisi tersebut mampu membiakkan oligarki menjadi salah satu fenomena politik yang tak terhindarkan bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Hingga kemudian peralihan menuju demokrasi yang dianggap dapat membuka lebar ruang keterlibatan rakyat, nyatanya tidak berhasil menguraikan praktik oligarki. Justru para oligark mampu bertransformasi menyesuaikan karakteristik pemerintahan demokrasi untuk dapat tetap bertahan bahkan mampu mengakar kuat secara sistemik dalam sistem perpolitikan Indonesia saat ini.

Seiring berjalannya waktu, adanya desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang bagi oligark untuk dapat berkembang di tingkat lokal. Tingginya biaya kontestasi politik lokal serta output yang cukup menjanjikan, membuka peluang pilihan bagi oligark untuk dapat terlibat baik secara langsung maupun tidak dengan tujuan dapat memperoleh eksklusivitas. Tentu keterlibatan tersebut umumnya dipicu oleh latar belakang/tujuan tertentu. Sebagaimana terjadi dalam Pilkada di beberapa daerah, dewasa ini banyak oligark yang terlibat secara langsung dalam agenda electoral. Penguasaan terhadap sumber daya material menjadi pemicu terjadinya politik uang serta dominasi terhadap partai politik pengusung pada suatu kontestasi politik.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Sebelumnya, pemilihan dilakukan oleh DPRD setingkat disetiap wilayah administrasi yang kemudian melahirkan evaluasi bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan ini tentunya mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 yang kemudian dilengkapi dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai sangat sarat akan kepentingan golongan. Karena yang terjadi praktik oligarki berlangsung secara kolektif berdasarkan kesepakatan kelompok kepentingan. Namun sekalipun dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah merupakan suatu arena kontestasi politik yang tidak terlepas dari pertarungan kekuasaan dan perebutan dukungan dari banyak pihak baik elite, aktor partai politik, kelompok non-pemerintahan maupun masyarakat setempat. Beragam cara diperlukan untuk memenangkan posisi strategis dan segala *privilege* yang ditawarkan. Kualitas dan kapabilitas politik kandidat, popularitas serta kemampuan pendukung diperlukan dalam perebutan posisi strategis. Namun faktor lain juga mempengaruhi kemenangan seperti dukungan moril maupun materiil dari elit-elit tertentu yang kemudian membentuk kekuatan baru dalam perpolitikan yang ada.

Pada penelitian ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana seorang pemilik sumber daya kekayaan dapat terlibat bahkan mengontrol jalannya demokrasi yang seharusnya dapat bersifat inklusif bagi seluruh masyarakat menjadi agenda sektoral yang eksklusif bagi kalangan tertentu. Melalui organ-organ demokrasi, aktor maupun kelompok penguasa menggunakan sumber daya yang dimiliki menyusun strategi-strategi politik untuk mendapatkan posisi politik strategis. Baik dengan cara menjadi pemimpin secara langsung maupun dengan cara mendukung pihak lain dalam suatu kontestasi yang dianggap memiliki komunikasi politik terbaik. Adanya modal sosial maupun finansial menjadi suatu kebutuhan dasar untuk mendukung adanya usaha kemenangan agar dapat menggerakkan masyarakat untuk memilih pada saat hari pemilihan.

Dari sekian banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu posisi/jabatan, sumber daya material merupakan alat yang serbaguna, paling luwes, berdaya tahan lama dibanding sumber daya lainnya dalam mempengaruhi hasil politik sehingga dapat dikatakan sebagai sumber

daya yang serba bisa¹. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan bagi para pemilik sumber daya kekayaan bahkan sebagian elit seringkali menggunakan kekayaan mereka untuk dikonversikan menjadi bentuk kekuasaan yang lebih konkrit dibanding menggunakan kekayaannya hanya sekedar untuk diinvestasikan maupun menggunakan sumber daya (jejaring) sosial yang cenderung sulit untuk dikontrol dan diprediksi. Hal yang serupa juga berlaku dalam Pilkada, terlebih karena biaya politik di Indonesia yang cukup tinggi sehingga kepemilikan terhadap modal finansial menjadi suatu keistimewaan. Untuk kampanye saja misalnya, di beberapa daerah perlu menggaet penyanyi ataupun artis ternama untuk menarik simpati dari idolanya. Dimana hal tersebut membutuhkan modal pendanaan yang kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan popularitasnya di masyarakat.

Sebagai salah satu kota dengan fenomena calon tunggal pada pilkada serentak Indonesia tahun 2018, semula Kota Makassar tidak disangka akan menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon yang harus dihadapkan dengan kolom kosong dalam surat suara. Adanya dinamika politik lokal yang terjadi mendorong timbulnya pilkada dengan pasangan calon tunggal. Jika umumnya pasangan calon tunggal di daerah lain terjadi karena adanya praktik pemborongan dukungan partai serta kegagalan kandidat lainnya untuk maju melalui jalur independen dan mengumpulkan sejumlah syarat dukungan berupa salinan E-KTP masyarakat setempat. Hal yang berbeda terjadi di Kota Makassar, justru kedua pasangan calon yang siap bertanding dalam pilkada serentak 2018 baik melalui jalur independen maupun jalur partai politik dan berhasil memenuhi persyaratan administrasi masing-masing.

Pemilihan Kepala Daerah berhasil diikuti oleh dua pasang calon yakni pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi atau yang akrab dengan sebutan Appi-Cicu dan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti atau dikenal dengan Diami. Pada dasarnya kedua pasangan calon tentunya melakukan hal yang sama yaitu berusaha menggalang dukungan dari banyak lapisan. Pasangan calon pertama, Appi-Cicu berhasil maju dengan

¹ Jeffrey A. Winters. 2011. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 15.

mengantongi dukungan dari sepuluh partai politik, diantaranya Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Partai Gerindra, PKS dan PPP; serta beberapa elit seperti IAS, NH, dan FMB. Sedangkan pasangan calon kedua, Diami, berhasil maju melalui jalur independen dengan kesuksesannya mengumpulkan sejumlah 117.494 dukungan salinan e-KTP masyarakat Kota Makassar.² Sayangnya, dalam perjalanan pasangan calon kedua yang merupakan *Incumbent* terdiskualifikasi karena telah melakukan praktik *money politic* berdasarkan hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga kemudian menyisakan satu pasangan calon yang selanjutnya harus dihadapkan dengan kolom kosong untuk tetap menjaga kualitas demokrasi. Tentu adanya diskualifikasi calon tersebut tidak terlepas dari beragam spekulasi dan juga persepsi banyak pihak. Pasalnya pasangan yang bertahan pun berasal dari keluarga yang cukup adidaya di kota tersebut.

Dukungan sepuluh partai tidak begitu saja dimiliki oleh calon pertama yang kemudian menjadi calon tunggal tersebut. Semua datang secara bertahap. Pada awalnya Appi-Cicu diusung oleh 2 partai yakni partai Golkar dan Nasdem.³ Kemudian disusul oleh Partai Hanura dan PBB. Kemudian disusul dengan 6 (enam) partai lainnya yang semula mendukung pasangan petahana yang diantaranya PPP, PKPI, PKS, PDIP, PAN, Partai Gerindra, serta 3 (tiga) partai politik non parlemen lainnya yakni Partai Idaman, Partai Berkarya, dan Partai Perindo⁴ dan dukungan tersebut berangsur datang setelah pasangan calon kedua memutuskan untuk menggunakan jalur Independen. Hingga pada akhirnya genap didukung oleh 10 (sepuluh) partai dan berhasil mengantongi 43

²Ibnu Munsir, 2018. Bawa 22 Truk KTP Danny Daftar Calon Independen Pilwalkot Makassar. <https://news.detik.com/berita/d-3748471/bawa-22-truk-ktp-danny-daftar-calon-independen-pilwalkot-makassar>. Diakses pada 1 Mei 2020 Pkl 02.45.

³Reinhart Soplantila. 2017. Nasdem Resmi Usung CEO PSM di Pilwalkot Makassar. <https://news.detik.com/berita/d-3761473/nasdem-resmi-usung-ceo-psm-di-pilwalkot-makassar>. Diakses pada 20 Maret 2019.

⁴Kurniawan Eka Mulyana. 2017. 9 Parpol Komitmen Dukung Danny. <https://makassar.sindoneews.com/read/1239/2/9-parpol-komitmen-dukung-danny-1510873904>. Diakses pada 20 Maret 2019

dari 50 kursi yang ada di parlemen.⁵ Jika di beberapa pilkada kota/kabupaten juga terjadi mayoritas partai memiliki kecenderungan untuk mendukung calon tunggal dan kesemuanya dimenangkan oleh kandidat tunggal tersebut. Tetapi yang terjadi dalam Pilkada kota Makassar justru berbeda, kolom kosong berhasil memenangkan kesempatan politik pada saat itu. Kondisi yang semula terdapat 2 pasangan calon, justru mayoritas partai mendukung kandidat dengan latar belakang pengusaha yang baru pertama kali memasuki dunia politik dibandingkan kandidat lawan merupakan seorang petahana yang memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas yang tinggi di masyarakat. Realita politik tersebut menjadi kontradiktif dengan apa yang terjadi dalam Pilkada di daerah lainnya. Seperti contohnya pada Pilkada dengan Calon Tunggal di Kabupaten Pasuruan, Blitar, Pati bahkan Kabupaten Enrekang, dimana mayoritas partai justru mendukung pasangan calon *Incumbent* di daerah tersebut. Fenomena terpusatnya dukungan partai ini seringkali disebut dengan istilah ‘memborong partai’. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beragam faktor yang menjadi pertimbangan partai untuk kemudian merelakan gerbongnya pada satu koridor dengan keuntungan yang didapatkan. Namun apa yang terjadi pada Pilwalkot Makassar ini dinilai sangat sarat akan kepentingan akibat adanya fakta unik tersebut. Menurut pendapat beberapa tokoh, kondisi ini tidak terlepas dari kapasitas modal untuk biaya politik.

Disisi lain, jika dikaji kembali dari silsilah keluarga calon tunggal, Munafri Arifuddin atau yang akrab disebut dengan Appi merupakan anak menantu Aksa Mahmud yang juga merupakan saudara ipar dari mantan wakil Presiden Indonesia yakni Jusuf Kalla. Aksa Mahmud dan juga Jusuf Kalla merupakan sosok yang dihormati di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Ayah mertuanya, selain dikenal sebagai pendiri Bosowa Grup, juga Wakil Ketua MPR pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2004-2009. Sehingga latar belakang keluarga juga merupakan politikus

⁵Hendra Cipto. 2018. Lawan Petahana, Kerabat Jusuf Kalla Diusung 10 Partai di Pilkada Kota Makassar. [<https://regional.kompas.com/read/2018/01/10/18463041/lawan-petahana-kerabat-jusuf-kalla-diusung-10-partai-di-pilkada-kota>]. Diakses Pada 20 Maret 2019

senior dari partai Golkar sekaligus pengusaha yang sukses di Indonesia⁶. Munafri Arifuddin sendiri juga merupakan CEO dari PT. Persaudaraan Sepakbola Makassar (PT.PSM) sekaligus CEO dari beberapa anak perusahaan dari Bosowa Group. Dengan demikian dapat dikatakan kandidat merupakan calon yang mapan secara ekonomi. Adanya realita-realita tersebut sehingga kemudian menarik simpati penulis untuk melakukan penelitian terhadap calon tunggal dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018.

Disamping itu berbagai studi mengenai Pilkada di Makassar juga telah banyak di teliti. Selain karena mulai berkembangnya studi mengenai calon tunggal dalam perpolitikan Indonesia, juga karena fenomena menangnya Kolom Kosong untuk yang pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia sehingga studi kasus ini cukup menarik untuk dikaji dari beberapa perspektif. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Harianto, Wawan Budi Darmawan dan juga Muradi yang berjudul Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Makassar Tahun 2018⁷. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pergerakan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong dalam upaya memenangkan Pilkada Makassar di Tahun 2018. Gerakan tersebut dipicu akibat adanya kekecewaan yang terjadi pada masyarakat, pendukung dan tim sukses atas keputusan KPU yang kemudian bersatu menghimpun dukungan untuk mengkampanyekan kemenangan kotak kosong. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mahmoed Soehermono yang membahas mengenai Gerakan Relawan Melawan Relasi Kuasa dan Kapital pada Pilkada Makassar 2018. Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai analisis latar belakang, pola dan bentuk gerakan sosial atau gerakan relawan dalam Pilkada di Makassar tahun 2018, yang berhasil mengalahkan pasangan calon tunggal dan

⁶Hendra Cipto. 2017. Maju Pilwalkot Makassar, Menantu Aksa Mahmud Diusung 4 Partai. <https://regional.kompas.com/read/2017/12/04/19321481/maju-pilwalkot-makassar-menantu-aksa-mahmud-diusung-4-partai>. Diakses pada 20 April 2019.

⁷ Harianto, Wawan Budi D & Muradi. 2020. Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018. *Society*. Ed 8. Vol 2. Hlm 575-585.

memenangkan kolom kosong.⁸ Kedua penelitian tersebut berfokus pada bagaimana gerakan pemenangan Kolom Kosong dapat terjadi dalam Pilkada Makassar Tahun 2018.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Dadan Herdiana yang berjudul Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi di Tingkat Lokal. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penyebab terjadinya calon tunggal dan juga penyebab menangnya kotak kosong dalam Pilkada Makassar di Tahun 2018. Selain itu peneliti juga berusaha untuk merumuskan dan memberikan tawaran solusi untuk kasus calon tunggal yang mungkin terjadi lagi di Indonesia.⁹

Dengan mempertimbangkan berbagai fenomena yang terjadi dan juga latar belakang calon walikota, hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pasangan calon tunggal tersebut kemudian dapat mengorganisir basis ekonomi yang dimilikinya untuk membangun jejaring politik, termasuk dalam mendapatkan dukungan/*support* politik yang datang baik dari partai maupun perseorangan dalam upaya memenangkan Pilkada Kota Makassar thun 2018, kemudian keuntungan apa yang akan diperoleh para pendukung baik elit maupun partai dalam upaya memenangkan Pilkada 2018 di Kota Makassar serta penyebab calon tunggal mengalami kekalahan.

1.2. Rumusan Masalah

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Makassar 2018 tidak terlepas dari kekuatan sumber daya politik yang dimiliki oleh elit setempat yang terlibat dalam kontestasi, baik sumber daya material maupun non-material. Dalam hal ini segala persaingan yang ada diantara kandidat yang bertaruh pada saat itu baik Munafri Arifuddin maupun Moh. Ramdhan Pomanto tidak terlepas dari

⁸ Mahmoed Soehermono. 2019. Gerakan Relawan Melawan Relasi Kuasa dan Kapital pada Pilkada Makassar 2018. *Repository Unair*. <http://repository.unair.ac.id/92555/>. Diakses pada 13 November 2020

⁹ Dadan Herdiana & Indra Syahrial. 2019. Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi di Tingkat Lokal. *Nagari Law Review*. Vol 3 No 1. Hlm 13-26.

adanya oligark yang berusaha mempertahankan eksistensi kekayaannya melalui agenda elektoral di tingkat daerah. Terlepas dalam tahapannya kemudian hanya diikuti oleh calon tunggal yakni Munafri Arifuddin yang didampingi oleh Andi Rahmatika Dewi, seorang politisi perempuan muda kota Makassar karena lawannya Moh. Ramdhan Pomanto yang didiskualifikasi berdasarkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya.

Tentunya hal tersebut menjadi suatu kondisi yang mempengaruhi peta kontestasi politik pada saat itu. Terlebih kondisi ekonomi calon tunggal yang dapat dikatakan cukup mapan berpengaruh terhadap langkah-langkah yang diambil untuk membangun jejaring politik sebagai bentuk upaya memenangkan Pilkada Kota Makassar pada tahun 2018 tersebut. Banyaknya dukungan yang kemudian dikantongi oleh kandidat tidak terlepas dari adanya komunikasi dan juga strategi politik hingga kemudian dapat mendominasi dukungan partai yang ada ada pada parlemen pada saat itu. Sehingga dapat melampaui ambang batas pencalonan melalui jalur partai. Hanya saja komunikasi dan penyusunan strategi politik bukanlah hal yang sederhana, ada proses atau tahapan lain sehingga kemudian dapat memantapkan baik elit maupun partai pendukung.

Namun kembali lagi sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Salim Said,

“Tidak ada yang gratis dalam politik. Semua bergantung pada tawar menawar. Semakin kuat seorang politikus dapat meyakinkan pendukungnya, maka akan semakin sedikit kemungkinan rentenir untuk menekan politikus terpilih.”¹⁰

Dalam hal ini penulis juga menyangsikan mengenai jumlah dukungan yang dimiliki oleh calon. Karena dalam hal ini politik transaksional merupakan suatu yang niscaya untuk menopang sistem koalisi pemenangan kandidat. Terlebih adanya komposisi partai politik pendukung yang merata, tidak hanya partai baru melainkan juga partai politik senior nasional juga mendukung adanya calon tunggal tersebut. Sehingga dari komunikasi politik yang

¹⁰ Anonymous. https://mediaindonesia.com/amp/amp_detail/108366-dalam-politik-tidak-ada-yang-gratis. Diakses pada 7 April 2020 Pukul 02.40.

dilakukan tersebut tentu ada timbal balik yang diharapkan terlebih partai sudah rela memberikan nama kebesarannya sebagai kendaraan bagi pasangan calon. Terlepas hasilnya dapat sesuai dengan keinginan ataupun tidak karena mengingat pemilu merupakan *predictable procedures, but unpredictable results*.¹¹

Walaupun pada awalnya semua peserta dalam kompetisi tentu mengharapkan kemenangan. Namun proses tetaplah proses, perencanaan dapat dilakukan dengan baik tetapi rakyat juga tetap memiliki hak untuk memilih berdasarkan preferensi politik mereka masing-masing. Tentu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekalahan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada saat itu. Oleh karena itu penulis sekaligus peneliti memberikan batasan sebagai koridor pembahasan dalam tulisan ini.

Berdasarkan uraian limitasi yang ingin dibahas oleh penulis dapat disimpulkan ke dalam beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini, diantaranya :

- a. Bagaimana Munafri Arifuddin menggunakan basis ekonomi untuk membangun jejaring politik dalam upaya memenangkan Pilwalkot Makassar tahun 2018?
- b. Apa keuntungan yang diperoleh elit ataupun partai politik ketika mendukung Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018?
- c. Meskipun telah memborong suara partai dalam Pilwalkot Makassar, mengapa Munafri Arifuddin mengalami kekalahan melawan kolom kosong?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari beberapa fenomena yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, maka tujuan penelitian ini, diantaranya :

- a. Mengetahui cara Munafri Arifuddin menggunakan basis ekonominya untuk membangun jejaring politik sebagai upaya memenangkan Pilwalkot Makassar tahun 2018.

¹¹ Ramlan Surbakti. 2019. Pelembagaan Ketidakpastian. Kompas, 19 Februari 2019.

- b. Mengetahui keuntungan yang diperoleh elit ataupun partai politik ketika mendukung Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018?
- c. Mengetahui penyebab kekalahan Munafri Arifuddin melawan kotak kosong meskipun telah memborong suara partai dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca dan juga bagi pengembangan studi politik di Indonesia.

1.4.1. Manfaat Akademik

- a. Sebagai pengembangan pengetahuan tentang politik electoral terutama ketika tidak bertanding dengan kompetitor lain namun mengalami kekalahan sebagai fenomena yang menarik untuk dikembangkan dalam diskursus tentang kompetisi tanpa kompetitor.
- b. Melihat realitas politik dari perspektif yang berbeda baik secara normatif maupun empirik.
- c. Sebagai kajian kritis mengenai oligarki dan pilkada.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rujukan bahan kajian atas keterlibatan oligark dan elit dalam agenda elektoral di tingkat lokal.
- b. Sebagai rujukan pembuatan kebijakan mengenai pelaksanaan pilkada.

1.5. Kerangka Konseptual/Teori

1.5.1. Konsep Pilkada

Pilkada merupakan suatu prosedur untuk memilih kepala daerah baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi secara langsung oleh masyarakat daerah setempat. Berdasarkan UU No.8 Tahun 2015 Pemilihan kepala daerah, baik Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil, dan walikota bersama wakil merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat secara demokratis dan langsung di tingkat daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pilkada juga

dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme perubahan politik mengenai arah kebijakan yang memuat suksesi pemimpin serta dilakukan secara berkesinambungan dan periodik.

Abdul Asri berpendapat dalam bukunya bahwa Pilkada secara langsung merupakan dasar penyelenggaraan demokrasi untuk di lingkup daerah, dimana bukan hanya prosedur pemilihan yang lebih demokratis dibanding sebelumnya tetapi juga sebagai sarana pembelajaran politik serta wujud nyata dari bentuk kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan secara langsung rakyat memiliki kedaulatan terhadap pemimpin yang nantinya terpilih dan tentu berbeda dari mekanisme sebelumnya ketika kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD atau bahkan oleh presiden secara langsung. Dengan adanya pilkada langsung seluruh rakyat di masing-masing setiap daerah memiliki hak pilih dan hak suaranya secara langsung serta bebas, terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri berdasarkan preferensi masing-masing. Sehingga esensi demokrasi dan kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat, serta hambatan demokrasi dapat diminimalisir.¹²

Menurut Joko (2005) tujuan awal dari penyelenggaraan Pilkada pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah dengan harapan dapat berjalan lebih efektif dan efisien¹³. Tidak hanya itu saja, pemilihan secara langsung dapat memberikan sudut pandang baru bahwa proses pilkada akan memenuhi kaidah tahapan demokratisasi baik pada level struktural maupun kultural di tingkat lokal¹⁴. Dengan melibatkan unsur partisipasi publik diharapkan akan memberikan nilai-nilai keterbukaan, independensi, dan kejujuran kepada rakyat karena pemimpin yang dipilih berdasarkan preferensi mayoritas masyarakat terhadap kandidat yang ada.

¹² Abdul Asri Harahap. 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*. Jakarta: Cisendo.

¹³ Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Belajar. Hal. 98

¹⁴ Ramlan Surbakti. 2005. *Suksesi Pilkada : Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*. Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama.

Terlepas dari tujuan penyelenggaraannya, Pilkada tetaplah suatu arena pertarungan politik di tingkat daerah. Dimana didalamnya tidak terlepas dari gabungan kepentingan baik dari individu, kelompok maupun partai yang terakumulasikan menjadi satu tujuan yang secara garis besar untuk mendapatkan kekuasaan, jabatan politik bahkan prioritas serta *privilege* atas eksistensi pihak tertentu. Sehingga tidak jarang dalam prosesnya pihak yang terlibat berlomba-lomba untuk menarik simpati pemilih, baik sekedar dalam kegiatan sosialisasi, silaturahmi, kampanye, bahkan program lain yang sekiranya menarik. Namun tentu kesemuanya tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja tentu memerlukan persiapan sehingga strategi yang dijalankan dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Sehingga dalam kalimat lain Pilkada dapat juga diartikan sebagai arena pertarungan kekuasaan seseorang untuk mendapatkan suatu kekuasaan.

Dalam suatu pemilihan tentu diawali dari adanya tahap pencalonan/pendaftaran baik secara perseorangan maupun atas dukungan partai. Proses pencalonan umumnya berawal dari adanya lobi-lobi politik atau komunikasi antara para kandidat yang menjadi calon kepala daerah dengan partai pengusung sebagai kendaraan, baik karena perolehan suaranya dalam pemilihan legislatif sebelumnya yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun karena kandidat memiliki kedekatan hubungan dengan partai. Dalam beberapa kasus tertentu bahkan pupolaritas dan kapabilitas yang dimiliki oleh calon juga dapat menarik simpati partai dalam pengusungan menjadi kandidat atau kondisi ini yang umumnya disebut dengan pinangan partai. Terdapat beberapa kecenderungan proses pencalonan dalam pilkada setelah lobi atau komunikasi berlangsung, yang dilihat dari sisi kandidat menurut Haris¹⁵, diantaranya yaitu:

- 1) Adanya kepemilikan dana dan dukungan finansial yang cukup tetapi kurang dari segi popularitas di kalangan masyarakat daerahnya.

¹⁵ Syamsudin haris, 2005, "*Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 6-7

- 2) Memiliki keterbatasan dana dan dukungan finansial tetapi memiliki kapabilitas dan popularitas yang tinggi di mata masyarakat setempat.
- 3) Memiliki dana dan dukungan finansial yang besar, namun adanya klaim secara pribadi akan tingkat popularitas di kalangan masyarakat setempat.
- 4) Memiliki keterbatasan dana dan dukungan finansial tetapi cukup kharismatik dalam pandangan masyarakat setempat, umumnya dikenal sebagai keturunan tokoh yang berpengaruh di daerahnya.
- 5) Seorang Petahana dengan *career record* yang baik dan ingin mencalonkan kembali untuk masa kepemimpinan selanjutnya.

Beberapa kondisi tersebut tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi partai untuk mengusung pasangan calon dalam suatu kontestasi politik baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat. Selain melalui dukungan partai sebagai kendaraan politik, peserta pilkada juga dapat maju melalui jalur independen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Seseorang dapat maju dalam Pilkada melalui jalur non-partai dengan syarat dukungan calon perseorangan yang maju pada pilkada, yaitu 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih atau DPT pilkada terakhir¹⁶. Dukungan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga setempat yang juga masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga seseorang yang hendak mencalonkan diri atau terlibat dalam agenda electoral masih memiliki alternatif lain.

1.5.2. Konsep Kekuasaan Politik

Adanya kontestasi politik baik di tingkat daerah maupun pusat tidak lain adalah untuk memperebutkan kekuasaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekuasaan berasal dari kata dasar kuasa yang mana memiliki arti untuk mengatur, memerintah, dan sebagainya; kemampuan individu atau golongan untuk mengendalikan orang atau golongan lain atas

¹⁶Estu Suryowati. Syarat Berat, Banyak Calon Kepala Daerah dari Jalur Perseorangan Gugur. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/20245951/syarat-berat-banyak-calon-kepala-daerah-dari-jalur-perseorangan-gugur>. Diakses pada 18 April Pukul 1.32 WIB.

kepemilikan wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Sehingga kekuasaan dapat dipahami sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengendalikan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas kepemilikan terhadap sumber daya tertentu yang dimiliki. Dalam beberapa pembahasan kekuasaan juga sering dimaknasi sebagai suatu posisi strategis atau jabatan dalam suatu instansi terpandang.

Beberapa cara seringkali dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk dapat menduduki kursi kekuasaan. Dengan demikian aktor tersebut diharapkan dapat memiliki hak untuk memaksakan orang untuk patuh atau setidaknya dapat melancarkan tujuan yang dimilikinya¹⁷. Koalisi maupun oposisi menjadi langkah strategis yang seringkali dilakukan untuk menggaet dukungan dari partai untuk mendapatkan kekuasaan politik. Bahkan tidak jarang kekayaan pun dapat menjadi modal bagi seseorang untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Menurut Kacung Marijan (Dalam Jurnal Yuristianti), secara konseptual, terdapat 3 (tiga) modal yang menjadi faktor kemenangan yang perlu dimiliki oleh calon untuk dapat menduduki kursi kekuasaan di tingkat daerah, diantaranya:¹⁸

- 1) Modal politik, dukungan secara politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik lainnya.
- 2) Modal sosial, yang berkaitan dengan jaringan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon terhadap masyarakat yang menjadi pemilihnya.
- 3) Modal ekonomi. Pilkada secara jelas membutuhkan biaya yang besar. Modal yang besar tidak hanya digunakan untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye.

¹⁷Carter April. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: CV Rajawali. Hlm 25-26.

¹⁸Safira Yuristianti. 2018. *Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017 (Studi Kasus: Sistem Rekrutmen Calon Oleh Partai Politik)*. Semarang : FISIP Universitas Diponegoro.

Modal-Modal tersebutlah yang biasanya menjadi bekal untuk mendapatkan kekuasaan atau posisi strategis tertentu. Selain ketiga poin tersebut, Winters dalam bukunya juga menyampaikan bahwa seorang individu dapat memperoleh kekuasaan berdasarkan lima (5) sumber daya yang mungkin dimiliki oleh individu¹⁹, diantaranya :

- a. Hak Politik Formal. Sumber daya ini merupakan sumber kekuasaan yang dapat dikatakan langka sekaligus tersebar pada setiap individu. Sekalipun sudah banyak upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam hak politik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hak politik diantara individu satu dengan yang lain masih bersifat eksklusif. Masih terdapat pengklasifikasian antar individu yang kemudian berakibat pada kesempatan untuk terlibat dalam politiknya.
- b. Jabatan Resmi. Sumber daya kekuasaan yang satu ini dapat dikatakan sebagai sumber daya yang bersifat tentatif dan terikat kondisi. Seseorang dengan jabatan tinggi baik dalam bidang politik, social, maupun ekonomi dapat menggunakan kekuasaannya ketika dalam masa jabatannya saja. Ketika nantinya jabatan tersebut berakhir, maka akan berakhir pula kapabilitas seseorang untuk memobilisasi anggotanya.
- c. Kekuasaan Pemaksaan. Sumber daya ini bersifat memonopoli dan mengikat. Namun, seiring berkembangnya negara ke arah yang lebih modern sumberdaya ini sudah jarang digunakan.
- d. Kekuasaan Mobilisasi. Hal ini lebih mengacu pada kapabilitas seseorang untuk menggerakkan pihak lain, meyakinkan, bahkan memacu orang lain untuk bertindak sesuai dengan tujuan tertentu. Pemilik sumber daya ini umumnya tidak memiliki jabatan tinggi, senjata ataupun kemampuan untuk memaksa, melainkan kapasitas yang mereka peroleh dari status social, gagasan/pemikiran yang dimilikinya, maupun wibawa yang dimiliki sehingga dapat berikap persuasive terhadap banyak individu.

¹⁹ Winters, *Op.Cit.*, Hlm 18

- e. Kekuasaan Material. Sumber daya ini merupakan yang paling fleksibel diantara yang lainnya. Sekalipun umumnya bersifat eksklusif bagi beberapa kalangan saja, tetapi kepemilikan terhadap material merupakan sumber daya yang paling bias untuk dikonversikan ke dalam bentuk sumber daya lainnya. Tidak hanya itu saja bahkan juga dapat digunakan oleh oligark untuk mempertahankan maupun meningkatkan kekayaan yang dimilikinya.

Bentuk sumber daya yang digunakan oleh calon tunggal untuk memperoleh kekuasaan pada Pilwalkot Makassar Tahun 2018 menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan kemampuan kapital dan juga relasi politik menjadikan Munafri Arifuddin memiliki kemudahan dalam upaya untuk memperoleh kekuasaan politik.

1.5.3. Konsep Pertahanan Kekayaan (*Wealth Defense*)

Membahas mengenai oligark maupun oligarki tentu tidak terlepas dari kaitannya dengan kepemilikan sumberdaya kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok serta upaya untuk mempertahankannya. Bahkan Winters pun mengatakan dalam bukunya bahwa keterlibatan Oligark dalam perpolitikan tentu bukan lain jika tidak untuk mempertahankan kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut tentunya didukung oleh alasan bahwa kepemilikan atas sumber daya material merupakan sesuatu yang bersifat eksklusif bagi kalangan tertentu. Sehingga memiliki konsekuensi terhadap ancaman dari pihak luar.²⁰ Adanya klaim kepemilikan dan juga kesenjangan lah yang kemudian mendorong bahwa perlu adanya kepastian untuk menegaskan hak yang dimiliki para pemilik sumber daya kekuasaan material tersebut untuk mempertahankan eksistensi kekayaannya. Sehingga cakupan pertahanan kekayaan oleh seorang oligark meliputi tantangan dan juga kemampuan

²⁰ *Ibid*, Hlm 11.

tertentu yang tak dimiliki kaum minoritas lain dalam bentuk dominasi atau keistimewaan lainnya.²¹

Bentuk pertahanan kekayaan yang dilakukan para oligark pun dapat berupa pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Sehingga untuk menjaga sekaligus kekayaannya seringkali oligark mengkonversikannya menjadi sumber daya material untuk kekuasaan para oligark dan dinamika pertahanannya pun dikelola secara politis. Tentunya tingkat keterlibatan oligark dalam politik dipengaruhi oleh seberapa *urgent* kekayaan yang harus dipertahankan. Semakin tinggi kebutuhan untuk mempertahankan, maka semakin besar kemungkinan oligark untuk terlibat secara langsung. Dan sebaliknya jika keberadaan sistem politik mampu melindungi hak milik dan kekayaan secara ketat maka akan memungkinkan oligark untuk tidak terlibat secara langsung.

1.5.4. Teori Oligarki

Studi politik tidak terlepas dari pembahasan mengenai kekuasaan. Baik cara mendapatkan kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji perilaku yang dilakukan sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan dengan kemampuan ekonomi yang ia miliki. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori oligarki sebagai suatu pendekatan ekonomi dan politik dalam penelitian agar fenomena lebih mudah untuk dipahami. Istilah oligarki menjadi diskursus yang banyak dikaji penelitian politik dewasa ini. Seringkali istilah oligarki²² dipahami sebagai bentuk kekuasaan oleh kelompok minoritas. Namun pendefinisian tersebut terlalu parsial untuk dipahami, sehingga Winters (2011) menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan konteks cara yang digunakan dan juga alat (sumber daya kekuasaan) apa yang digunakan.²³

Menurut Winters dalam mendefinisikan oligarki ada 2 hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu oligark memiliki dasar kekuasaan–

²¹ *Ibid.* hlm 10

²² Istilah Oligarki berasal dari bahasa Yunani *Oligarchia* yang terdiri atas kata *oligoi* yang berarti sedikit dan *arkhein* yang berarti memerintah.

²³ *Ibid.* hlm 4.

kekayaan material-yang susah untuk dipecah dan disetarakan. Kedua yakni adanya jangkauan kekuasaan kelompok minoritas oligarki yang luas, sistemik dan susah dipecah/dihancurkan sehingga mampu bertahan dalam bentuk pemerintahan apapun. Kondisi tersebut dibuktikan oleh Winters dengan jatuhnya rezim orde baru yang tidak menghilangkan oligarki dalam perpolitikan Indonesia. Antara oligark dan oligarki merupakan dua hal yang berbeda. Oligark merupakan pelaku yang memiliki kemampuan mengendalikan sumber daya materialnya yang besar untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan juga posisi sosialnya yang eksklusif. Sedangkan oligarki lebih merujuk pada tindakan politik yang dilakukan untuk mempertahankan kekayaan material yang dimiliki.²⁴ Bentuk pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh oligark dapat berupa pertahanan harta maupun pertahanan pendapatan. Tidak hanya sekedar mempertahankan tetapi juga termasuk menjamin keamanan sumber daya yang dimilikinya dari ancaman yang mungkin dapat membahayakan eksistensinya.²⁵

Dalam pemikiran Winters kekuasaan material memiliki garis yang linear dengan politik. Dalam penjelasannya, kesenjangan material yang ekstrem menghasilkan kesenjangan politik yang sama. Kondisi ini terbilang cukup paradox terutama dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Realitanya semakin timpang distribusi kekayaan yang terjadi maka akan semakin besar pengaruh dan kekuasaan orang dengan kepemilikan harta dalam jumlah banyak terhadap motif dan tujuan politik mereka. Sehingga yang terjadi adalah kekuasaan eksklusif yang hanya mencakup minoritas dengan kekayaan yang solid. Karena kekuasaan politik dinilai lebih memberikan peluang besar kepada mereka yang memiliki kapasitas sumber daya material yang besar. Kekayaan dapat disebut sebagai sumber daya kekuasaan yang bersifat ampuh, fleksibel dan multifungsi terhadap mempengaruhi hasil politik.

²⁴ *Ibid.* hlm 8-11.

²⁵ *Ibid.* hlm 16.

Winters menjelaskan perilaku oligark dapat bertindak secara individual maupun kolektif. Perbedaan bentuk oligark bergantung pada bentuk ancaman dan keuntungan yang diperoleh oleh oligark untuk mempertahankan kekayaannya. Pemikiran tersebut didasari adanya realita bahwa kepemilikan kekayaan hanya berada ditangan minoritas (ketimpangan).²⁶ Tesis Winters dalam fenomena oligarki di Indonesia mendasarkan analisis mengenai pemanfaatan politik electoral oleh oligark untuk mempertahankan kekuasaan dengan terlibat dalam pendanaan kontestasi politik. Hal ini karena aliran dana yang dimiliki sebagai modal politik cenderung lancar sehingga dapat menguasai celah kekuasaan lainnya. Dengan begitu tantangan politik bagi oligark dan basis oligarki pada dasarnya adalah mempertahankan diri terhadap berbagai ancaman atas kesenjangan material yang terjadi. Bentuk pertahanan tersebut dapat berupa keterlibatan politis oligark baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut bergantung pada tingkat kebutuhan oligark untuk mempertahankan kekayaannya.

Teori oligarki menurut Winters memusatkan perhatian pada kekuasaan pelaku menggunakan sumber daya material dalam bidang politik dengan dampak ekonomi yang konkrit. Secara sederhana, Seorang oligark dapat menjadi elit dengan sumber daya kekayaan yang dimilikinya tetapi seorang elit belum tentu juga seorang oligark. Karena elit hanya diukur dengan jabatan, kondisi berbeda jika seorang elit menggunakan posisi strategis untuk memupuk kekayaan pribadi maka pada saat bersamaan dapat disebut sebagai oligark.²⁷

Winters menyebutkan bahwa terdapat beberapa tipe oligarki yang dapat digolongkan berdasarkan karakteristiknya yang meliputi tingkat keterlibatan oligark dalam upaya pemaksaan yang mendukung kepemilikan mereka atas harta dan kekayaan, keterlibatannya dalam suatu jabatan/ kekuasaan, sifat pemaksaan yang terpecah ataupun kolektif, serta kadar beroperasinya yang

²⁶ Ibid. hlm 34.

²⁷ Ibid. hlm 12-15.

dapat bersifat liar ataupun jinak.²⁸ Dari keempat karakteristik tersebut Winters (2011) juga membagi tipologi menjadi empat, yang diantaranya :

- a. Oligarki Panglima, yakni oligarki yang muncul atas kekuasaan memaksa (koersif) secara langsung antar oligark panglima dan bersifat lateral. Dimana setiap oligark memiliki senjata serta terlibat dalam kekerasan dan pemaksaan untuk memperoleh apa yang telah menjadi tujuannya. Termasuk didalamnya memiliki pasukan bersenjata dan adanya perebutan sumber daya antara oligark satu dengan yang lain. Kekuasaan bersifat pribadi dan terpecah-pecah.
- b. Oligarki Penguasa Kolektif, yakni oligark yang berkuasa secara berkelompok/kolektif dengan seperangkat norma tertentu namun berperan secara individual dalam kekerasan. Tipe ini para oligark bersama-sama untuk mempertahankan kekayaannya dan mendominasi komunitas yang berada di bawahnya. Dalam oligarki penguasa kolektif, antara dominasi oligarki kolektif dan individu dalam pertahanan kekayaan kadang berbeda-beda dan bertentangan. Adanya pemaksaan memang penting. Namun, kekuasaan material, jabatan resmi, dan pemaksaan ditangan individu oligark yang ambisius dapat menghancurkan oligark penguasa kolektif.
- c. Oligarki Sultanistik, bentuk oligarki yang terjadi jika komando terpusat pada satu oligark saja, sehingga hubungan antara oligark penguasa dengan oligark yang lain bersifat patron-client. Pada jenis ini oligark tidak menggunakan senjata sebagai sarana pemaksaan melainkan melakukan monopoli atas kekayaan oligark lainnya, sehingga menarik oligark lainnya untuk menginvestasikan kekayaannya untuk mempertahankan sumber daya material yang dimilikinya. Peran pertahanan berada di satu tangan oligark dengan kekuasaan besar secara langsung dan bersifat pribadi. Kestabilan suatu oligarki bergantung pada bagaimana oligark tertinggi mengelola

²⁸ *Ibid.* Hlm 48.

pertahanan kekayaan milik oligark secara umum. Sebagai contohnya Winters menyebutkan fenomena pemerintahan Presiden Soeharto.

- d. Oligarki Sipil, pada oligarki bentuk ini, oligark tidak terlibat secara langsung dan tidak pula menggunakan senjata sebagai sarana pemaksaannya. Secara spesifik oligark mempercayakan kekuasaan untuk mempertahankan kekayaan yang dimilikinya pada lembaga dengan hukum yang kuat. Pemaksaan dalam pertahanan harta oligarki dilakukan oleh negara bersenjata. Dengan begitu oligark hanya terfokus pada pertahanan pendapatan, karena hak milik dan pertahanan harta dapat dijamin oleh negara. Sehingga oligark dapat mendapatkan perlindungan dari sistem (negara) secara langsung sebagai upaya perlindungan dari jangkauan negara untuk melakukan redistribusi kekayaan yang dimilikinya, Winters mencontohkan salah satunya melalui pajak progresif.

Keempat tipe oligarki tersebut dapat berubah bergantung pada perkembangan situasi dalam suatu wilayah. Perubahan tersebut mampu berubah sebagaimana yang terjadi pada bentuk kekuasaan oligark pemerintahan Soeharto dan pasca reformasi keduanya mengalami perubahan dari bentuk oligarki sultanistik menuju oligarki penguasa kolektif dikarenakan perubahan situasi politik.

Kenyataan tersebut juga diperkuat oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam bukunya *Reorganizing Power in Indonesia : The Politics of Oligarchy in an Age of Market* (2004), dimana oligarki tidak tumbang pasca lengsernya Soeharto. Hal ini karena oligarki mampu bertransformasi menyesuaikan konteks politik yang ada di suatu negara. Berakhirnya orde baru justru menjadi titik balik baru bagi para oligark untuk tetap dapat mendominasi kekuatan ekonomi politik di Indonesia.²⁹ Dalam penelitiannya, kedua tokoh tersebut mendapati oligark menggunakan partai politik selaku komponen

²⁹ Richard Robison & Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia : The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. New York : Roulledge Curzon. Hlm 29.

demokrasi sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi politik.³⁰ Bahkan kebijakan desentralisasi pasca orde baru mampu mengubah kekuatan ekonomi politik menjadi relasi yang juga terdesentralisasi. Biaya kontestasi politik lokal yang tinggi membuka peluang oligark untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹

Meskipun memiliki beberapa kesamaan pandangan dengan Winters, namun dalam hal definisi, Robison dan Hadiz (2004) memaknai oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan kekuasaan serta upaya perlindungan secara kolektif atau secara sederhana oligarki didefinisikan sebagai sebuah sistem tempat berpusatnya seluruh kekuasaan politik pada segelintir orang kaya yang bekerjasama menyusun dan membuat kebijakan yang memberikan keuntungan kelompok secara finansial.³² Jika Winters lebih menekankan pada perilaku aktor atau agensi, Robison dan Hadiz menekankan oligarki pada relasi kekuasaan, pertahanan kekayaan bersifat kolektif.

Oligarki ditandai sebagai suatu sistem relasi kolektif terkait hubungan antara negara dengan para pemilik modal. Adanya desentralisasi telah menciptakan arena baru bagi pertarungan politik, justru elit politik dan birokrasi lokal melakukan transformasi menjadikan arena lokal sebagai sarana untuk pengakumulasian kekayaan. Mengacu pada studi perbandingan yang dilakukan oleh Robison dan Hadiz, Adanya transformasi ke tingkat lokal tersebut menjadikan kajian mengenai Oligarki perlu ditinjau secara historis.

Tabel 2.1 Perbandingan Oligarki Menurut Jeffrey Winters dengan Richard Robison & Vedi R. Hadiz

	Perbandingan Oligarki	
	Jeffrey Winters	Richard Robison & Vedi

³⁰ Christian Chua. 2009. Capitalist Consolidation, Consolidated Capitalist: Indonesia's Conglomerates between Authoritarian and Democracy Dalam Marco Bunte and Andreas Ufen (ed). *Democratization in Post-Soeharto Indonesia*. Oxford: Routledge. Hlm 214

³¹ *Ibid.* hlm 217-218

³² *Op Cit.* Hlm 37

		Hadiz
Definisi	Politik pertahanan kekayaan antar aktor ekonomi dan politik atas kepemilikan kekayaan yang mereka miliki untuk mempertahankan dari ketimpangan kekayaan yang ada.	Relasi Kuasa yang memusatkan sumber daya ekonomi dan otoritas dengan perlindungan secara kolektif sehingga dapat memberikan keuntungan secara timbal-balik. Aktivitas didalamnya sering disebut sebagai predatoris
Fokus dan Sifat Oligarki	Politik pertahanan kekayaan (wealth defense) yang bersifat kolektif maupun individual	Sistem relasi kuasa yang bersifat kolektif
Unit Analisis	Menurut Jeffrey, Oligarki merupakan gejala yang sifatnya umum, ia melakukan perbandingan fenomena oligarki yang terjadi di beberapa negara.	Analisis oligarki menurut Robison dan Hadiz ini bersifat historis mengenai bagaimana perkembangan kapitalisme di Indonesia sejak orde baru hingga pasca runtuhnya rezim otoriter.
Skala/ Cakupan Oligarki	Karena perbandingan dilakukan antar negara sehingga cakupan oligarki pada skala yang lebih luas atau yang terjadi di tingkat nasional.	Secara spesifik membahas mengenai perkembangan oligarki Pasca pemerintahan Soeharto. Lebih pada perkembangan oligarki dari nasional ke tingkat lokal dengan adanya desentralisasi.

Selain Jeffrey Winters, Richard Robison & Vedi R. Hadiz, kajian mengenai oligarki di Indonesia juga dilakukan Oleh Boni Hargens (2019). Dalam penelitiannya yang berjudul *Oligarchic Cartelization in Post- Suharto Indonesia: Exploring the Legislative Process of 2017 Election Act* membahas mengenai kartelisasi oligarki yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Dengan menggabungkan dua teori besar yakni teori oligarki dan juga kartel politik, menurut Hargenz pasca runtuhnya Pemerintahan Soeharto, Indonesia tidak hanya dikendalikan oleh kekuatan politik oligark saja melainkan juga kartel partai politik. Sehingga teori yang dibangun lebih pada bagaimana oligarki partai mampu membangun kartel politik untuk menguasai sumber daya negara demi kepentingan partai dan hegemoni oligarkis.³³

Beberapa tesis yang disampaikan oleh Hargens sifatnya melengkapi pemikiran Winters serta Robison & Hadiz mengenai oligarki di Indonesia. Pada dasarnya bentuk penguasaan politik yang terjadi selama ini adalah tidak hanya oligarki, tetapi kartel yang beroperasi. Segelintir elite penguasa yang menguasai sumber daya ekonomi dalam kaitannya dengan sifat oligarki mereka dan mengooptasi negara untuk mempertahankan *privilege* yang mereka peroleh dari interpenetrasi kolusif dengan negara terkait sifat kartelisasi mereka.³⁴ Kartel oligarki ini menguasai implementasi demokrasi perwakilan dengan mengatur pembuatan kebijakan di semua tingkatan dan membatasi persaingan partai dalam pemilu untuk mempertahankan status quo. Dalam penelitiannya Hargens menggunakan contoh fenomena tidak ada pendatang baru di DPR karena kursi parlemen dimonopoli oleh partai-partai besar serta adanya pembentukan koalisi besar yang mendukung Pemerintahan Jokowi setelah partai oposisi arus utama, GERINDRA, akhirnya bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah pemerintahan periode kedua Jokowi (2019-2024).³⁵

³³ Bonifasius Hargens. 2019. *Oligarchic Cartelization in Post- Suharto Indonesia: Exploring the Legislative Process of 2017 Election Act*. Walden Dissertations and Doctoral Studies. Hlm 254

³⁴ *Ibid.* hlm 344

³⁵ *Ibid.* hlm 385

Hargens mengatakan bahwa oligarki sebagai kekuatan sentral yang bermuka dua dalam pengetahuan bahwa mereka bekerja sebagai oligarki di dalam institusi partai, tetapi dalam hubungannya dengan negara, mereka bertindak sebagai kartel. Oligarki juga mengejar kepentingan berlapis-lapis yang meliputi kepentingan individu oligarki sebagai kelompok individu, kepentingan kolektif oligarki sebagai sistem oligarki, dan kepentingan kelembagaan partai oligarki sebagai partai kartel. Wajah ganda oligarki mengimplikasikan kepentingan berlapis-lapis yang mereka kejar baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Sehingga dalam hal ini praktik oligarki yang terjadi tidak hanya bertindak sebagai oligark tunggal melainkan membawa kepentingan-kepentingan lain sebagaimana individu tersebut berasal. Menurutnya sebagai konsekuensi utama dari kartelisasi oligarkis telah mengubah sifat demokrasi perwakilan menjadi demokrasi kolusif. Dalam hal ini Hargens memaknai demokrasi kolusif yaitu kartelisasi sebagai sebuah kecenderungan baru yang menjadi modus operandi oligarki partai dalam menguasai proses hukum di tingkat parlemen.³⁶

Dalam pandangan Hargens Partai politik merupakan institusi yang secara fundamental strategis diperlukan dalam kartelisasi. Institusi politik partai adalah organisasi oligarki yang tak terelakkan dengan naluri dasar ganda secara intra-organisasi, elit partai tetaplah oligarki murni dimana mereka yang mempertahankan status quo organisasi, namun dalam hubungannya dengan negara dan partai oligarki lainnya, oligarki partai ini sengaja menjadi kartel untuk mempertahankan hak-hak istimewa yang diperoleh dari interpenetrasi kolusif dengan negara.³⁷ kartelisasi politik sebagai kecenderungan strategis di antara oligarki partai untuk dikartelisasi untuk mempertahankan status quo organisasinya dalam organisasi partai, mempertahankan keistimewaan yang mereka peroleh dari interpenetrasi kolusif dengan negara, menguasai praktik demokrasi, dan mengandung yang kompetisi pemilihan mengenai

³⁶ *Ibid.* hlm 387

³⁷ *Ibid.* hlm 390

penyumbatan pendatang baru dalam pemilu.³⁸ Dalam teori ini posisi oligarki yang dimaksudkan terletak pada partai politik dimana dalam suatu Partai tentu terdapat elit yang berkuasa, yang dalam gerakannya bersamaan dengan organisasi (partai) atau bahkan gabungan yang berusaha mengkooptasi sumber daya milik negara dengan praktik kartel atau dengan meminimalisir persaingan yang ada.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan oligarki yang disampaikan oleh Winters dikarenakan penelitian ini tidak menaruh perhatian eksklusif kepada partai melainkan lebih pada perilaku oligark dalam menguasai partai politik untuk tujuan memperoleh kekuasaan politik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Winters dimana ia melihat partai politik sebagai organ organisasi atau struktural bagi oligarki untuk beroperasi. Sederhananya, institusi partai menurut Winters, tidak lebih dari boneka di tangan oligarki agar dapat mempertahankan penguasaan politik strategi pertahanan kekayaan sebagai tujuan akhir mereka. Ini menyiratkan bahwa para oligarki dapat hidup di dalam dan tanpa organisasi partai.³⁹ Meskipun dalam prosesnya tidak terlepas dari adanya kartelisasi oligarki yang dilakukan oleh partai-partai pendukung. Namun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada oligark sebagai individual yang berusaha menguasai dukungan dari banyak pihak untuk memenangkan Pilkada Tahun 2018.

1.6. Metode Penelitian

Menurut Aminah dan Roikan (2019), metode penelitian merupakan suatu logika yang digunakan sebagai panduan dalam suatu penelitian. Bailey juga menyampaikan bahwa metodologi merupakan keseluruhan dasar nilai-nilai, asumsi yang menjadi standar untuk memaknai/memahami serta menarik kesimpulan dari data hasil penelitian. Dimana metode tersebut digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang menjadi permasalahan

³⁸ *Ibid.* hlm 398

³⁹ *Ibid.* hlm 396

dalam penelitian serta untuk menguji terhadap suatu teori atau bahkan menemukan teori baru.⁴⁰

Dalam penelitian ini, metode penelitian adalah suatu prosedur yang dilakukan dalam rangka melakukan penelitian yang meliputi proses pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan Oligarki dalam Pilkada: Pertaruhan kekuasaan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018 sehingga kemudian dapat diperoleh data yang baik untuk ditarik sebuah kesimpulan.

1.6.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu konsentrasi yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam serangkaian penelusuran dan pengumpulan informasi serta penganalisaan data sehingga diperoleh data sesuai yang dibutuhkan. Fokus penelitian juga dapat dimaknai sebagai batasan penelitian agar dapat berjalan sesuai koridor topik penelitian.

Penelitian ini berfokus pada Oligarki dalam Pilkada: Pertaruhan kekuasaan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018. Terutama dalam kaitannya dengan dukungan yang diperoleh dari mayoritas partai secara bertahap hingga dapat mengantongi mayoritas kursi di parlemen.

1.6.2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Aminah dan Roikan Penelitian kualitatif menghasilkan analisis deskriptif, karena umumnya digunakan untuk memahami secara spesifik makna fenomena sosial dari sudut pandang yang dimiliki oleh subjek penelitian⁴¹. Fokus penelitian kualitatif yakni untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat dari pihak yang terlibat secara langsung ataupun yang mengetahui.

⁴⁰S. Aminah dan Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 61.

⁴¹ *Ibid.* hlm 54-55.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran secara lengkap mengenai dinamika yang terjadi dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018. Utamanya dari pihak calon tunggal yang berhasil mendapatkan dominasi dukungan dari Partai Politik yang menduduki kursi parlemen, peneliti ingin mencari tahu mengenai cara-cara yang dilakukan calon untuk memenangkan kontestasi politik lokal, latar belakang pendukung, serta hasil dan juga implikasi dari agenda Pilwalkot 2018 di Kota Makassar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam upaya kemenangan.

1.6.3. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah-langkah ilmiah yang digunakan seorang peneliti untuk memperoleh data/ informasi dengan tujuan dan fungsi tertentu⁴². Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Dimana peneliti melakukan riset tentang Oligarki dalam Pilkada: pertarungan kekuasaan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018. Secara spesifik, riset ini dilakukan atas dasar ketertarikan peneliti terhadap salah satu fenomena Calon Tunggal yang muncul dalam Pilkada yang diselenggarakan secara serentak di Indonesia pada tahun 2018 khususnya di Kota Makassar. Peneliti melihat adanya hal yang unik karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu Indonesia pasangan calon tunggal berhasil dikalahkan oleh kolom kosong disamping dominasi dukungan partai yang dimilikinya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah terdapat peranan oligarki dibalik dominasi dukungan partai dan pencalonan Munafri Arifuddin dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2018.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan hal yang penting dalam melakukan sebuah penelitian, karena lokasi mencakup batasan wilayah spesifik yang akan diteliti. Dalam penelitian Oligarki dalam Pilkada: Pertarungan kekuasaan

⁴² Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018, peneliti melakukan penelitian di Kota Makassar berdasarkan studi kasus yang dipilih oleh peneliti. Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Mei 2020.

1.6.5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang menjadi narasumber dan dianggap dapat memberikan informasi/data terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Subyek dalam penelitian Oligarki dalam Pilkada: Pertaruhan Kekuasaan Munafri Arifuddin Dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018 adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian dukungan bahkan yang memperoleh dukungan dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018. Tidak hanya itu saja termasuk pihak-pihak yang turut mengawal jalannya Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018. Secara spesifik beberapa subyek diantaranya sebagai berikut :

1.6.5.1. Munafri Arifuddin

Calon Walikota nomor urut satu (01) dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018. Dalam penelitian ini mewawancara Munafri dikarenakan merupakan calon yang secara langsung mendapat dukungan dari mayoritas partai. Tujuan wawancara dengan subyek ini tidak lain untuk menanyakan kembali alasan politik calon sebagaimana informasi yang telah diterima peneliti dari informan lainnya serta untuk mengetahui motivasi secara langsung dari pihak yang bersangkutan.

1.6.5.2. Farouk M. Betta

selaku Ketua Tim pemenangan Appi-Cicu sekaligus perwakilan dari partai Golkar. Dalam penelitian ini mewawancara Farouk M. Betta dikarenakan beliau merupakan ketua Golkar Kota Makassar sehingga dipercaya Farouk terlibat secara langsung dalam upaya pemenangan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018. Terlebih Golkar juga turut mengusung nama Munafri Arifuddin dalam pencalonan Pilwalkot Makassar 2018.

1.6.5.3. Suwadi Idris Amir

Direktur Indeks Politica Indonesia (Salah satu Konsultan Politik di Makassar). Dalam penelitian ini mewawancara Suwadi karena diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam dari pihak lawan. Mengingat posisi beliau sebagai konsultan politik lawan pada saat Pilwalkot 2018 yang kemudian beralih menjadi konsultan Politik Munafri Arifuddin.

1.6.5.4. Arif Wicaksana

Pengamat Politik Kota Makassar. Dalam penelitian ini mewawancara Arif Wicaksana dikarenakan beliau juga ikut mengawal jalannya Pilwalkot 2018. Beliau juga aktif dalam Tim pemenangan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot 2018 maupun 2020.

1.6.5.5. Wahab Tahir,

Sekretaris DPD Golkar Kota Makassar. Dalam penelitian ini mewawancara Wahab Tahir dikarenakan berdasarkan beberapa informasi yang didapatkan melalui media dan keterangan dari pihak partai beliau terlibat dalam pengusungan calon pada saat persiapan Pilwalkot 2018.

1.6.5.6. Amin Rais,

Perwakilan Timses Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2018. Dalam penelitian ini mewawancara Amin Rais dikarenakan antara pemilihan Gubernur dan Walikota memiliki garis yang kontinum , sehingga beliau juga terlibat dalam upaya pemenangan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot 2018 bersama dengan partai Golkar.

1.6.5.7. Musjaya,

Salah satu rekan kerja Amin Rais di salah satu lembaga bantuan hukum kota Makassar sekaligus Ketua Tim Pemenangan Nurdin Abdullah. Dalam penelitian ini mewawancara beliau terkait dengan perselisihan antara Danny Pomanto dengan Munafri yang menimbulkan kekalahan di

kubu calon tunggal karena adanya keterkaitan antara kemenangan Pilgub Sulawesi Selatan dengan Pilwalkot Makassar 2018.

1.6.6. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Oligarki dalam Pilkada: Pertaruhan kekuasaan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018 ini sebagai berikut :

1.6.6.1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan subyek penelitian terkait Oligarki dalam Pilkada: Pertaruhan kekuasaan politik Munafri Arifuddi dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018 .

1.6.6.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh selain dari hasil percakapan langsung atau informasi yang disampaikan secara langsung oleh subyek penelitian dapat berupa dokumen-dokumen lembaga terkait, data yang diperoleh melalui internet, jurnal penelitian sejenis, dan juga artikel berita tentang riwayat pencalonan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018.

1.6.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menentukan data yang didapat saat penelitian dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

1.6.7.1. Wawancara mendalam

Yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara personal dengan proses tatap muka dan tanya jawab langsung dengan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi kepada peneliti⁴³. Wawancara menjadi bagian penting dalam mengumpulkan data dalam

⁴³ Aminah. *Op.Cit.* Hlm 68.

penelitian ini karena dalam wawancara proses interaksi bertatap muka langsung antara pewawancara dan responden.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh informasi mendalam mengenai Oligarki dalam Pilkada: Pertaruhan kekuasaan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018. Melalui wawancara secara langsung peneliti berusaha mengetahui proses-proses yang terjadi menurut sudut pandang subyek penelitian.

1.6.7.2. Studi Literatur

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan data-data sekunder selain data primer yang didapatkan langsung melalui wawancara, seperti artikel mengenai pencalonan Munafri Arifuddin dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018 dari media online, dokumen lain dari hasil penelitian terdahulu mengenai studi pilkada dan budaya politik yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Makassar, serta dokumen dari lembaga-lembaga terkait seperti KPU Kota Makassar.

1.6.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Sebagai penelitian yang deskriptif dan menggunakan cara wawancara dan data dari media maupun penelitian sejenis sebelumnya yang merupakan bentuk dari analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut terdapat empat teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.6.8.1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua cara, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan pengumpulan data baik berupa studi literasi melalui berkas, dokumen, jurnal penelitian, artikel dsb.

1.6.8.2. Reduksi Data

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, menyesuaikan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sampai mendapatkan kesimpulan. Dari data yang telah diperoleh peneliti kemudian digolongkan termasuk diinterpretasikan apakah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan peneliti ataukah tidak. Dalam tahap ini dapat dikatakan sebagai penyortiran data mana data yang sesuai fokus penelitian dan mana yang tidak sesuai.

1.6.8.3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk presentasi data yang diperoleh oleh penelitian. Dari data yang telah dipilah oleh peneliti kemudian di kelompokkan berdasarkan fokus penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel ataupun bagan agar lebih mudah untuk di deskripsikan dan juga memudahkan untuk penginterpretasian data.

1.6.8.4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan dan kemudian telah diinterpretasikan secara teoritik maka tahapan akhir dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dimana pada tahapan ini berisi penarikan intisari hasil penelitian.